

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Kementerian/Lembaga dilaksanakan entitas Akuntabilitas Kinerja berjenjang dengan tingkatan entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, entitas akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi dan entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah terdapat klausul yang menyebutkan bahwa menteri/pimpinan lembaga dapat memperluas praktek perjanjian kinerja sesuai kebijakan internal dan menetapkan suatu petunjuk pelaksanaan internal mekanisme penyampaian perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hierarki merupakan bahan untuk menyusun kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan uraian di atas Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan diwajibkan mengkonsumsi capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

### **B. Maksud dan Tujuan**

Adapun Maksud penyusunan LKIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi.

Sedangkan Tujuan penyusunan adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi

yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

### **C. Dasar Hukum**

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023 dengan memperhatikan pada Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan, sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 30);
13. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penetapan Standart Kode Klasifikasi Urusan, Bidang, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
14. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 05 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 697).
15. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 630);
16. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 116 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
17. Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 800/013/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

#### **D. Bidang Kewenangan**

Uraian tugas dan fungsi serta struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 116 Tahun 2021 dengan uraian tugas pokok dan fungsi.

- **Tugas**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga Kabupaten.

- **Fungsi**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- b) Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- c) Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk.
- d) Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.
- e) Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana.
- f) Pelaksanaan Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan kader KB.
- g) Pelaksanaan Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi.
- h) Pelaksanaan pelayanan KB.
- i) Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peranserta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- j) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- k) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan
- l) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Oleh karena itu tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai berikut :

#### **I. Kepala Dinas**

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang-bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta kesekretariatan.
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Uraian Tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
2. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
3. Menyenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
4. Membina, mengkoordinasikan dan mengelola data dan informasi yang terkait dengan Pengendalian Kuantitas Penduduk dan Keluarga Berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
5. Membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
6. Membina dan mengarahkan Kepala Sekretariat dan para Kepala Bidang dalam tugasnya;
7. Melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya pegawai dalam lingkup Dinas;
8. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan;
9. Melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan perlengkapan dan peralatan Dinas;
10. Menyenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait; Menilai prestasi kerja Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
12. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **II. Sekretariat Dinas**

Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, urusan tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana daerah Kabupaten Tapanuli Selatan menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/urusan tata usaha.
- b) Koordinasi penyusunan perencanaan.
- c) Pengelolaan administrasi keuangan.
- d) Pengelolaan administrasi kepegawaian.
- e) Pengelolaan administrasi perlengkapan
- f) Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protocol.
- g) Koordinasi pelaksanaan tugas-tugas bidang.
- h) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana.
- i) Koordinasi penyusunan Laporan Kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan
- j) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### **a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan administrasi umum/urusan tata usaha, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/urusan tata usaha.
- b. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol.
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan/asset.
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- e. Melaksanakan penyusunan laporan urusan umum dan kepegawaian.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### **b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran serta verifikasi, pembukuan dan pelaporan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

- b. Membuat Perjanjian Kinerja Bidang-Bidang.
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- d. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Anggaran Kas Kegiatan di Lingkungan Dinas.
- e. Menyiapkan bahan penerimaan, pembayaran dan pengeluaran anggaran belanja dinas.
- f. Melaksanakan administrasi pemungutan, pemetaan dan pelaporan pajak-pajak.
- g. Melaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi keuangan dinas.
- h. Melaksanakan akuntansi keuangan dinas.
- i. Melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan.
- j. Melaksanakan pengawasan administrasi kebendaharawanan lingkup dinas.
- k. Menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dinas.
- l. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati.
- m. Mengkoordinasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHKIP, dan
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### **III. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan**

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan Daaerah Kabupaten.

Dalam Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- c. Pelaksanaan Norma Standar, Prosedur dan Kriteria dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- d. Pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
- e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten dan kota
- f. Pelaksanaan Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat di tingkat kabupaten dan kota di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- g. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB)

- h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### **IV. Bidang Keluarga Berencana**

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang keluarga berencana.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga Berencana
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Keluarga Berencana
- 3) Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang Keluarga Berencana
- 4) Pelaksanaan Penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kabupaten dan kota
- 5) Pelaksanaan Pelayanan KB di Kabupaten /Kota
- 6) Pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber KB di Kabupaten /Kota
- 7) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana
- 8) Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana
- 9) Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya
- 10) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Keluarga Berencana
- 11) Pelaksanaan administrasi dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- 12) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

#### **V. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Dalam Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- b. Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Balita.
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan kerahanan remaja .
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia dan rentan.
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga.



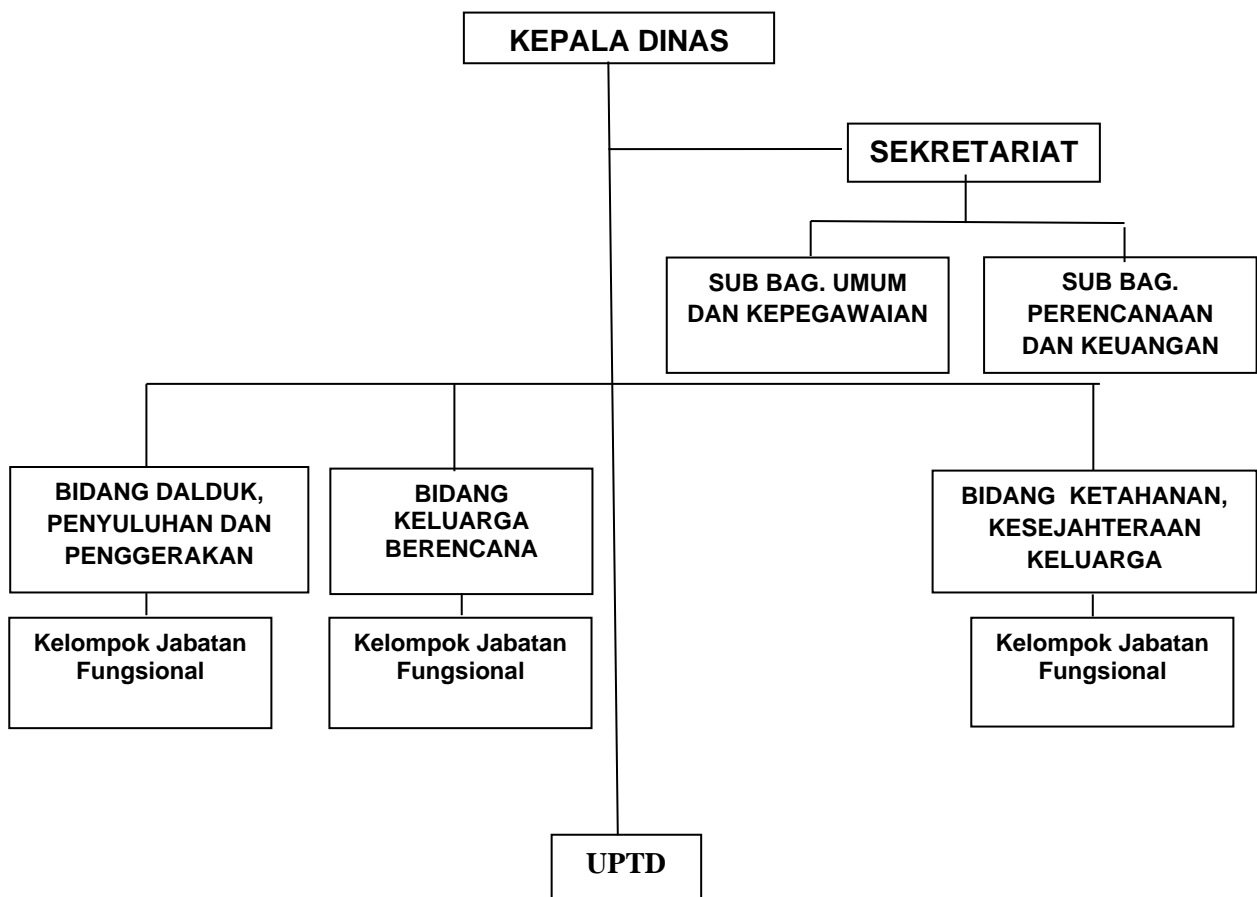
- g. pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga.
- i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.
- j. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- k. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### VI. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah dapat dibentuk sejumlah kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (a), mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### E. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana dalam Bagan di bawah ini



F. **Gambaran Umum**

1. **Sumber Daya Aparatur**

Keberhasilan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Kabupaten Tapanuli Selatan tidak terlepas dari sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya.

Sumber daya Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus memenuhi jumlah, mutu dan penyebaran petugas lapangan, disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan Keluarga Berencana Nasional di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kegiatan-kegiatan dalam sumber daya Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat berupa perencanaan, kebutuhan tenaga (petugas), peningkatan kemampuan profesionalisme melalui pendidikan dan pelatihan pembinaan tenaga Keluarga Berencana.

Sumber Daya Aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023 Sebagai berikut :

No.	Pegawai	L	P	JUMLAH
1	PNS	10	27	37
2	CPNS	-	-	-
3	Honor Daerah	-	1	1
4	Honor Provinsi (PLKB)	-	-	-
5	Tenaga Harian Lepas (THL)	9	40	49
Jumlah		19	67	87

2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No.	Pendidikan	L	P	JUMLAH
1	Pasca Sarjana (S-2)	5	5	10
2	Sarjana (S-1)	10	31	41
3	Sarjana Muda / D3	1	18	19
4	D-1 / D-2	-	-	-
5	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	3	12	15
6	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	-	-	-
7	Sekolah Dasar (SD)	-	1	1
Jumlah		19	67	87

3. Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	L	P	JUMLAH
1	Golongan IV	3	1	4
2	Golongan III	7	21	28
3	Golongan II	1	4	5
4	Golongan I	-	-	-
Jumlah		11	27	37

4. Berdasarkan Diklat Penjenjangan

No.	Diklat	L	P	JUMLAH
1	ADUMLA / DIKLAT PIM IV	-	-	-
2	SPAMA / DIKLAT PIM III	1	-	1
3	DIKLAT PIM II	1	-	1
Jumlah		2	-	2

5. Berdasarkan Eselon dan Non Eselon

No.	Eselon	L	P	JLH	Non Eselon	L	P	JLH
1	Eselon II	1	-	1	Pelaksana	10	19	29
2	Eselon III	2	2	4	Entry Data/Pengemudi	5	44	49
3	Eselon IV	1	1	2	Petugas Kebersihan	-	1	1
Jumlah		4	3	7	Jumlah	15	64	79

6. Tenaga Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB/PPLKB)

No.	Kecamatan	L	P	JUMLAH
1	Batang Angkola	-	1	1
2	Sipirok	-	2	2
3	Sipirok Dolok Hole	-	1	1
4	Angkola Timur	-	4	4
5	Angkola Barat	-	2	2
6	Angkola Selatan	1	2	3
7	Marancar	-	1	1
8	Batang Toru	-	2	2
9	Sayur Matinggi	1	-	1
10	Arse	1	1	2
11	Muara Batang Toru	1	0	1
12	Aek Bilah	-	-	-
13	Angkola Sangkunur	-	1	1
14	Tantom Angkola	-	1	1
15	Angkola Muaratais	-	3	3
Jumlah		4	21	25

2. Sarana dan Prasarana

Adapun Sarana Prasarana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

No.	URAIAN	JUMLAH
1	Gedung Tempat Kerja	16 Unit
2	Kendaraan Roda 4	7 Unit
3	Kendaraan Roda 2	74 Unit
4	Meja	57 Buah
5	Kursi	100 Buah
6	Laptop	13 Unit
7	Personal Computer (PC)	10 Unit
8	Proyektor	15 Unit
9	Telephon Mobil (Smartphon)	14 Unit
10	Smart TV	4 Unit
Jumlah		307 Unit

Sasaran hasil Program pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan adalah meningkatnya kesadaran dan mutu sumber daya manusia serta perwujudan keluarga yang berkualitas.

3. Isu-Isu Strategis

Laju pertumbuhan penduduk di Sumatera Utara dalam kurun waktu 2020 - 2022 masih tinggi yaitu mencapai 1,21 % sedangkan di Kabupaten Tapanuli Selatan selama periode 2020 – 2022 mencapai 0,44 %, sedangkan pada tahun 2023 mencapai 1,07 % yang dikhawatirkan penduduk tersebut tidak berkualitas yang kebanyakan di daerah-daerah miskin, terpencil, padat penduduk dan kampung-kampung nelayan yang jauh dari puskesmas atau klinik KB.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa salah satu yang menjadi faktor dominan penyebab Meningkatnya Laju Pertumbuhan Penduduk yang kebanyakan di daerah-daerah miskin yang terpencil serta jauh dari puskesmas/klinik KB dan padat penduduk.

Permasalahan kependudukan di atas tentunya akan berdampak pada pembangunan daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Beberapa permasalahan yang dapat terjadi dari aspek kuantitas penduduk berdampak pada pembangunan antara lain :

- a. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan produksi (pangan, sandang, papan).
- b. Pembangunan berpusat pada daerah padat penduduk sehingga terjadi kesenjangan sosial.
- c. Munculnya pemukiman kumuh, sehingga ada kesenjangan sosial antara kaya dan miskin
- d. Banyaknya pengangguran dan munculnya kriminal.

## BAB. II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis dan Arah Kebijakan

##### 1. Visi dan Misi

Mencermati visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 dengan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahap II Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026, merupakan bagian yang tidak terlepas dari upaya pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2005-2025 yaitu : **“Tapanuli Selatan yang Maju, Adil berlandaskan Agama dan Adat Budaya”**.

Untuk mewujudkan visi di atas, maka dirumuskan visi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

**“Tapanuli Selatan yang Maju Berbasis Sumber Daya Manusia Pembangun yang Sehat, Cerdas, Sejahtera serta Sumber Daya Alam yang Produktif dan Lestari”**.

Untuk mendukung Visi Bupati Tapanuli Selatan dalam RPJMD yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul dan mandiri berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta Iman dan Taqwa (IMTAQ).
2. Meningkatkan perekonomian Tapanuli Selatan yang berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya local yang produktif dan berwawasan lingkungan.
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan sumber daya di daerah dan Pemerintah Atasan serta meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas social dan umum masyarakat.
4. Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
5. Meningkatkan standard hidup layak, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Selatan.

Maka dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan termasuk Misi ke-1 yaitu **Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul dan mandiri berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta Iman dan Taqwa (IMTAQ)** juga mempunyai program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) yang akan dilaksanakan melalui Rencana Kerja (Renja).

Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dijabarkan dalam tabel dibawah ini :

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul dan mandiri berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta Iman dan Taqwa (IMTAQ)	Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk	Terkendalikannya Laju Pertumbuhan Penduduk	1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Sasaran Strategis tersebut di atas akan dijabarkan di dalam Indikator Kinerja Utama yang akan dicapai melalui Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan. Kemudian dalam implementasinya upaya pencapaiannya dijabarkan pada level komponen sebagai penghubung dalam penuangan berbagai kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran.

Arah kebijakan dalam menyelenggarakan pembangunan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kedepan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Cakupan dan Pelayanan KB yang Merata dan Berkualitas.
2. Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KKBPK.
3. Peningkatan Pembinaan Ketahanan Remaja.
4. Peningkatan Pembangunan Keluarga.
5. Penguatan Regulasi, Kelembagaan, serta Data dan Informasi.
6. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral

## B. Ringkasan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Menindaklanjuti hasil evaluasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi terhadap LAKIP Kabupaten Tapanuli Selatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan yang tertuang dalam Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 64 Tahun 2021 tentang Rencana Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021–2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	KET
1	Terkendalikannya Laju Pertumbuhan Penduduk	1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,25	

**C. Ringkasan Rencana Kerja Tahunan (RKT)**

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tahun Anggaran 2023 (diluar rutin) sebanyak 3 (tiga) Program dan 6 (enam) kegiatan (Daftar Terlampir)

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM		KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1	Program Pengendalian Penduduk	1. Pemetaan Perkiraan Penduduk Cakupan Daerah Kab/Kota a. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
		2	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	2. Pelaksanaan Advokasi, KIE, Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal. a. Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK b. Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK c. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokarkarya (Minilok)
		3	Program Pemberdayaan dan	3. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) a. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB 4. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota a. Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB b. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 5. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan

			Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga a. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) 6. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga a. Pendayadunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Organisasi Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).
--	--	--	-------------------------------------	--

#### **D. Ringkasan Rencana Kerja Anggaran (RKA)**

Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tahun Anggaran 2023 sebanyak 4 (empat) Program dan 11 (sebelas) kegiatan dengan pagu Rp. 15.273.839.268,- dan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) (Daftar Terlampir)

#### **E. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023**

Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023 mengacu kepada Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 64 Tahun 2021 tentang Rencana Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 – 2026 dapat dilihat pada daftar di bawah ini :



**PERJANJIAN KINERJA P.APBD  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH  
KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
TAHUN 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1.	Terkendalikannya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (Persen)	0,25 %

No	Program / Kegiatan	Anggaran		Keterangan
		Awal	Perubahan	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.799.910.173,-	Rp. 6.161.985.268,-	P.APBD
2.	Program Pengendalian Penduduk	-	Rp. 50.686.500,-	P.APBD
3.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 8.964.155.000,-	Rp. 8.994.203.000,-	P. APBD
4.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluaga Sejahtera (KS)	Rp. 66.964.500,-	Rp. 66.964.500,-	P. APBD
	<b>Total</b>	Rp. 14.831.029.673,-	Rp. 15.273.839.268,-	

Pihak Kedua,

H. DOLLY PASARIBU, S.Pt, MM

AHMAD IBRAHIM LUBIS, S.Sos, MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19740205 199602 1 003

Sipirok,

Pihak Pertama,

2023

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Dalam pengukuran capaian kinerja dilaksanakan dengan membandingkan antara Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja pada Tahun 2023.

$$\% \text{ Pencapaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk indikator “persentase laju pertumbuhan penduduk dan rata-rata jumlah anak per keluarga” menggunakan cara perhitungan yang berbeda karena semakin kecil capaian, semakin baik kinerja yang dicapai.

$$\% \text{ Pencapaian kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisaasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Predikat nilai capaian indikator skala pengukuran dikelompokkan dalam skala pengukuran sebagai berikut :

NO	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1.	90 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi
2.	76 % ≤ 90 %	Tinggi
3.	66 % ≤ 75 %	Sedang
4.	51 % ≤ 65 %	Rendah
5.	≤ 50 %	Sangat Rendah

Dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja secara umum Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023 dapat dikemukakan bahwa sebagian besar sasaran-sasaran strategis yang telah ditargetkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat sasaran strategis yang belum mencapai target yang diharapkan tahun 2023 dengan berbagai kendala. Rincian analisis capaian masing sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut :

**1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2023**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Terkendalikannya Laju Pertumbuhan Penduduk	1	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,25	1,07	23,36
Rata-Rata Capaian						23,36

Sumber Data : Dinas Dukcapil Kab. Tapsel

Berdasarkan dari tabel diatas dapat dilihat Indikator Kinerja Utama mendukung sasaran strategis tersebut kurang dari target indikator kinerja sasaran, maka secara umum pencapaian sasaran adalah 23,36 persen dengan kategori Rendah.

2. Perbandingan Antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		REALISASI (%)		CAPAIAN (%)	
			2022	2023	2022	2023
Terkendalikannya Laju Pertumbuhan Penduduk	1	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,49	1,07	57,14	23,36
Capaian			0,49	1,07	57,14	23,36

Sumber Data : Dinas Dukcapil Kab. Tapsel

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra.

SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA		SATUAN	Realisasi 2023	Target 2026
Terkendalikannya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju	Pertumbuhan Penduduk	1	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,07	0,23
Capaian						1,07	0,23

Jika melihat perbandingan Realiasi kinerja sampai dengan tahun 2023 yang terdapat dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan, maka secara umum indikator tersebut belum terealisasi melebihi target 2026.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Pencapaian kinerja pada tahun 2023 ini, sasaran kinerja dapat tercapai target hingga 100%, oleh karena itu implikasi pada predikat kinerja secara umum terkategori Sangat Rendah. Untuk lebih jelasnya kami sampaikan Pengukuran Kinerja sasaran yaitu sebagai berikut :

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI (RUMUS)	CAPAIAN %
1	Terkendalikannya Laju Pertumbuhan Penduduk	1. Laju Pertumbuhan Penduduk	0,25 %	<div>1,07</div> <div>(Jumlah Penduduk Tahun 2023 )</div> <div>% Pencapaian Kinerja = <math>\frac{319.989}{316.568} - 1 \times 100</math></div> <div>(Jumlah Penduduk Tahun 2022)</div>	23,36

Sumber Data : Dinas Dukcapil Kab. Tapsel

1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Bila dilihat capaian kinerja pada indikator di atas, capaian kinerja mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2022, yaitu dari 0,49 persen pada tahun 2022 meningkat menjadi 1,07 persen pada tahun 2023 atau mengalami peningkatan sebesar 0,58 persen. Oleh karena itu Laju pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan, artinya

dalam upaya penurunan laju pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat Pasangan Usia Subur (PUS) untuk ber-KB terutama di wilayah dan sasaran khusus (daerah tertinggal/perbatasan).

Kegagalan Laju Pertumbuhan Penduduk ini tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal. Adapun penyebab internal yang kami maksudkan antara lain :

- a. Rendahnya Kompetensi Aparatur Kelembagaan KB dan Kependudukan di Kecamatan.
- b. Kurangnya Tenaga Penyuluh di Lapangan sehingga sulit untuk menjangkau wilayah dan sasaran khusus (daerah tertinggal/perbatasan) dalam rangka sosialisasi, penyuluhan dan Pelayanan KB.
- c. Kurangnya penyebaran informasi melalui website, media cetak, media elektronik dan sosial media terkait pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan, Advokasi dan KIE serta Pelayanan kepada masyarakat terutama Pasangan Usia Subur (PUS) seperti di Kampung KB, Desa Binaan, Faskes-Faskes yang tersebar di seluruh kecamatan.

Sementara penyebab eksternal terhadap kegagalan pencapaian program/kegiatan yang kami maksudkan antara lain :

- a. Kurangnya komitmen dan kepedulian dari PLKB/PKB Kecamatan dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
- b. Kurangnya Kerjasama dan pelibatan dari pemrakarsa usaha/perusahaan melalui kegiatan CSR bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana untuk mendukung beberapa pengembangan kampung KB.
- c. Kurangnya sinergitas program/kegiatan yang telah direncanakan dengan program dari BKKBN RI dan Dinas Kesehatan seperti kegiatan Sosialisasi, Penyuluhan, Advokasi dan KIE serta Pelayanan kepada masyarakat terutama Pasangan Usia Subur (PUS) pada 15 kecamatan seperti di Kampung KB, Desa Binaan, RSUD Sipirok, Faskes-Faskes yang tersebar di seluruh Kecamatan, dll

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 15.273.839.268,- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 14.209.820.155,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan mencapai 93,03% yang diarahkan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Hasil yang dicapai adalah : Melakukan Sosialisasi, Advokasi dan KIE, Penyuluhan dan Pelayanan kepada masyarakat terutama Pasangan Usia Subur (PUS) pada 15 kecamatan seperti di Kampung KB, Desa Binaan, Puskesmas, Posyandu, RSUD Sipirok, dll.



Penyuluhan dan Pelayanan TNI-  
Bangga Kencana- Kes



Saat Pelayanan Kontrasepsi Mantap  
(MOW/MOP)



Saat Pelayanan Kontrasepsi Mantap  
(MOW/MOP)



Saat Pelayanan Kontrasepsi Mantap  
(MOW/MOP)



Saat Pelayanan Kontrasepsi Mantap  
(MOW/MOP)



Saat Pelayanan Kontrasepsi Mantap  
(MOW/MOP)

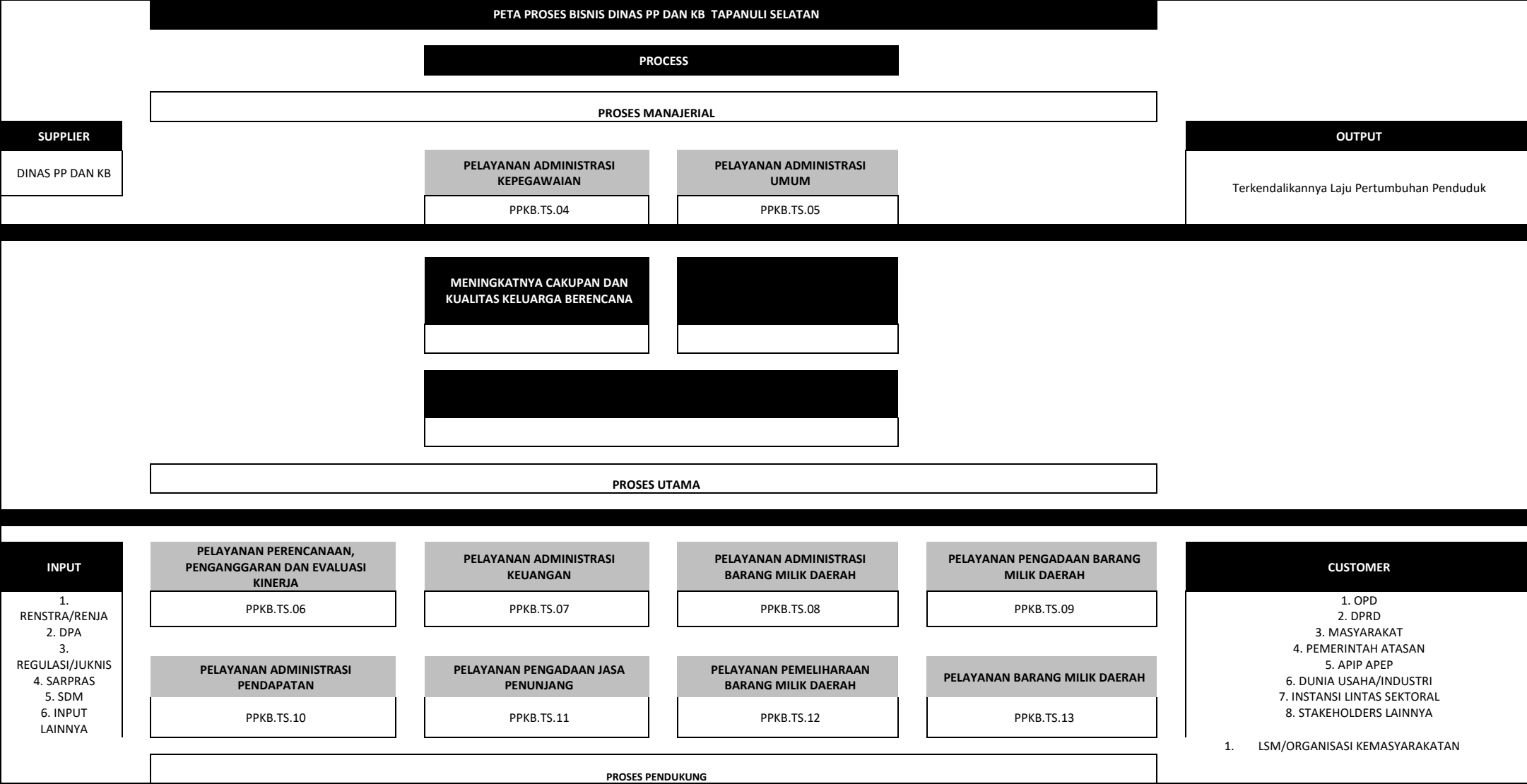


Saat Pelayanan Kontrasepsi Mantap  
(MOW/MOP)



Saat Pelayanan Implan dan IUD  
Bhakti Sosial IBI-Bangga Kencana- Kes

Peta Proses Bisnis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan



**5. Analisis Program dan Kegiatan Tahun 2023**

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \left[ \frac{\text{Efisiensi Biaya}}{\text{Target Biaya}} \times 100\% \right]$$

Pada tahun 2023 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 14.209.820.155,- sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp. 15.273.839.268. dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 6,97 %. Persentase efisiensi ini secara teori adalah kecil, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2023 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya. Namun kalau dilihat pada level kegiatan nampak adanya efisiensi penggunaan sumber daya pada beberapa kegiatan. Seperti pada kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang persentasenya mencapai 8,62 %, hal ini dikarenakan adanya beberapa menu kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 dalam pelaksanaan kegiatan, kerjasama dengan pihak swasta melalui CSR untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

**5.1. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan pencapaian Pernyataan Kinerja**

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian semua sasaran strategis ini adalah sebanyak 3 program dan 6 kegiatan. Adapun pencapaian dari setiap program dan kegiatan tersebut diuraikan di bawah ini :

❖ **Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)**

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 15.273.839.268,- dan realisasi keuangan mencapai Rp. 14.209.820.155,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan mencapai 93,03 % yang diarahkan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan keluarga berencana. Hasil yang dicapai adalah : Melakukan Sosialisasi, Penyuluhan dan Pelayanan kepada masyarakat terutama Pasangan Usia Subur (PUS) pada 15 kecamatan seperti di Kampung KB, Desa Binaan, Puskesmas, Posyandu, RSUD Sapiro, dll.

**B. Akuntabilitas Keuangan**

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 15.273.839.268,- anggaran tersebut terdiri atas belanja tidak langsung dan sebesar Rp. 3.692.406.212,- dan belanja

langsung sebesar 11.581.433.056,- untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada uraian berikut ini :

NO	URAIAN	ANGGARAN BELANJA Rp.	RELAISASI BELANJA Rp.	%
		2023	2023	2023
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.818.374.485	4.434.104.354	92,53
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	3.692.406.212	3.519.421.189	95,32
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	53.100.000	53.000.000	100,00
	Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	29.058.600	27.996.500	96,34
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13.925.200	12.764.300	91,66
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	105.336.000	105.336.000	100,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	25.000.000	25.000.000	100,00
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.585.000	97.133.000	99,54
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	43.976.900	43.976.000	100,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	251.751.920	241.905.400	96,09
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8.000.000	7.920.000	99,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	311.972.000	310.769.582	99,61
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	32.784.136	21.390.769	65,25
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.346.653.000	1.271.896.271	94,45
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	98.920.000	89.005.402	89,98
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.516.300	49.336.000	99,64
B	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	50.686.500	48.640.000	
1	PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN CAKUPAN DAERAH KAB/KOTA			
	Penyediaan Data dan Infomasi Daerah	50.686.500	48.640.000	95,96
C	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	8.994.203.000	8.218.660.742	
1	PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFA BUDAYA LOKAL			
	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	1.909.800.000	1.732.271.960	90,70
	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	130.048.000	129.688.386	99,72
	Pelaksanaan Mekanisme Operaional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (RAkorcam), RAPat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	20.040.000	17.685.000	88,25
2	PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB)			
	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	6.836.157.000	6.247.065.096	91,38
3	PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA			
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	30.000.000	30.000.000	100,00
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	68.158.000	61.950.300	90,89
D	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	66.964.500	63.569.000	
1	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA			
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orangtua HEbat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	33.268.500	31.796.500	95,58
2	PELAKSANAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KAB/KOTA DALAM PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA			
	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyrakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program KETAhanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	33.696.000	31.772.500	94,29
	Total	15.273.839.268	14.209.820.155	93,03

Adapun untuk anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan dari Tahun 2021 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan



begitu juga perhatian pemerintah terhadap urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana juga terus mengalami peningkatan. Peningkatan ini memiliki arti penting dikarenakan tekanan terhadap program Bangga Kencana akan semakin besar setiap tahunnya, sehingga bila tidak diikuti dengan peningkatan program Bangga Kencana maka laju pertumbuhan penduduk akan semakin menurun nantinya. Peningkatan program itu tentunya dapat dicapai bila didukung dengan alokasi anggaran yang memadai. Namun secara umum alokasi belanja langsung untuk kegiatan pada tahun 2023 mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2022.

Jumlah anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2023

NO	TAHUN	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2019	4.438.952.231	8.604.694.080	13.043.646.311
2	2020	3.382.670.054	7.055.033.000	10.437.703.054
3	2021	3.637.449.517	6.866.534.000	10.503.983.517
4	2022	3.821.257.968	8.217.872.517	12.039.130.485
5	2023	3.692.406.212	11.581.433.056	15.273.839.268

Sementara untuk realisasi penyerapan anggaran sebagaimana yang diperlihatkan pada tabel di bawah ini :

NO	TAHUN	TARGET		REALISASI		%	SISA ANGGARAN
		TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG		
1	2019	4.438.952.231	8.604.694.080	3.310.951.918	7.678.579.479	89,24	926.114.601
2	2020	3.382.670.054	7.055.033.000	3.293.008.506	5.194.461.884	81,32	1.950.232.664
3	2021	3.637.449.517	6.866.534.000	3.345.940.263	6.237.240.341	91,23	920.802.913
4	2022	3.821.257.968	8.217.872.517	3.612.323.265	7.674.348.136	93,75	752.459.084
5	2023	3.692.406.212	11.581.433.056	3.519.421.189	10.690.398.966	93,03	1.064.019.133

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa persentase penyerapan anggaran dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami penurunan. Meskipun realisasi secara umum masih berada pada 93,39 %. Oleh karena itu untuk sisa anggaran (silpa) masih terdapat peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan terlambatnya juknis pada kegiatan operasional penyuluhan keluarga berencana (BOKB) dan adanya beberapa menu kegiatan yang tidak terlaksana.

Adapun pencapaian Kinerja dan Realisasi Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir di bawah ini :

No	Sasaran Strategi	IKU	Target	Kinerja		Pagu	Anggaran		Tingkat Efesiensi
				Realisaasi	%		Realisasi	%	
1	Terkendalikannya Laju Pertumbuhan Penduduk	1. Laju Pertumbuhan Penduduk	0,25	1,07	23,36	15.273.839.268	14.209.820.155	93,03	6,97
		Capaian			23,36				

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berawal dari Visi dan Misi, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan serta kebijakan dan Program kegiatan dan juga pelaksanaan Program/kegiatan, maka dari hasil evaluasi dan analisa akuntabilitas kinerja tersebut maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023 pada indikator mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 yaitu dari rata-rata capaian kinerja 57,14 persen pada tahun 2022 menurun menjadi capaian kinerja 23,36 persen pada tahun 2023 atau mengalami penurunan sebesar 33,78 persen.
2. Adanya sinergitas program/kegiatan yang telah direncanakan dengan program dari BKKBN RI dan Dinas Kesehatan seperti kegiatan Sosialisasi, Penyuluhan, Advokasi dan KIE serta Pelayanan kepada masyarakat terutama Pasangan Usia Subur (PUS) pada 15 kecamatan seperti di Kampung KB, Desa Binaan, RSUD Sipirok, Faskes-Faskes yang tersebar di seluruh Kecamatan.
3. Program/Kegiatan yang dikelola oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan pada Tahun Anggaran 2023 sebanyak 4 (empat) Program dan 11 (sebelas) kegiatan yang mana program/kegiatan tersebut tingkat capaiannya adalah 93,03 %.

#### **B. Saran**

Dalam rangka Peningkatan Kinerja yang Akuntabel pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan maka perlu saran sebagai berikut :

1. Program/Kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan yang pendanaannya ditampung dalam APBD Kabupaten Tapanuli Selatan perlu ditingkatkan dalam rangka memberhasilkan Program Bangga Kencana sebagai dana Sharing kegiatan yang dibiayai APBN.
2. Perlu penambahan personil, Peningkatan Insentif Kader dan Petugas KB serta peningkatan status Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapanuli Selatan karena luasnya jangkauan wilayah Pembinaan.
3. Perlu peningkatan Kualitas Perencanaan Program agar Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang diprogramkan sebelumnya.
4. Perlu adanya peningkatan kerjasama antar stakeholder/mitra kerja dalam peningkatan program Bangga Kencana.

5. Perlu Peningkatan Pelatihan dan Pendidikan bagi Kader dan Petugas KB dalam Peningkatan kualitas data, Pencatatan dan Pelaporan serta Pelayanan KB.

**Sipirok, 4 Januari 2024**

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH  
KAB. TAPANULI SELATAN,**

**AHMAD IBRAHIM LUBIS, S.Sos.MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19740205 199602 1 003**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmad dan Hidayah-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Penyusunan LAKIP ini dilakukan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang berdayaguna dan berhasil guna berdasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance sebagai usaha untuk mewujudkan demokratisasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang menjadi tugas pemerintah saat sekarang ini. Hal ini merupakan suatu prasyarat dalam penyusunan mekanisme program, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian pembangunan. Untuk itu diperlukan suatu alat ukur yang mana diharapkan bisa menjawab tantangan pembangunan dimasa depan yang semakin dinamis, yang dimulai dari Unit / Instansi yang ada dalam pemerintahan itu sendiri.

Visi dan misi yang dalam penilaiannya harus sesuai dengan tugas yang diemban oleh instansi pemerintah dan diharapkan dapat dibuktikan dalam uraian tugas secara terukur serta dapat dipertanggung jawabkan melalui Perencanaan Strategis (Renstra), Penetapan Kinerja (PK) maupun Evaluasi Kinerja Kegiatan.

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023 ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I     PENDAHULUAN.....	1
A.    Latar Belakang .....	1
B.    Maksud dan Tujuan.....	1
C.    Dasar Hukum.....	2
D.    Bidang Kewenangan.....	3
E.    Struktur Organisasi.....	9
F.    Gambaran Umum .....	10
a.   Sumber Daya Aparatur.....	11
b.   Sarana dan Prasarana.....	11
c.   Isu-Isu Strategis.....	16
 BAB II    PERENCANAAN KINERJA.....	 13
A.    Rencana Strategis dan Arah Kebijakan .....	13
B.    Ringkasan Indikator Kinerja Utama .....	14
C.    Rencana Kerja Tahunan (RKT).....	15
D.    Rencana Kegiatan Anggaran (RKA).....	15
E.    Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	16
 BAB III   AKUNTABILITAS KINERJA .....	 17
A.    Pengukuran Kinerja.....	17
1.   Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2023.....	 17
2.   Membandingkan antara Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Capaian Kinerja Tahun 2022.....	 18
3.   Membandingkan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target Capaian Kinerja Akhir Tahun 2023 dalam Dokumen Rencana Kinerja Pemerintah Daerah.....	 18
4.   Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.....	 18
5.   Analisis Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023....	22
B.    Akuntabilitas Keuangan.....	22
 BAB IV    PENUTUP.....	 25
A.    Kesimpulan.....	25
B.    Saran.....	25

RENCANA KEGIATAN TAHUNAN (RKT)											
TAHUN 2023											
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. TAPANULI SELATAN											
No	Kode					Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja	Rencana Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7	8
1	1	14	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	1	14	01	2.02			ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH				
	1	14	01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Kab. Tapsel	100%	3,692,406,212	DAU
	1	14	01	2.02	02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tapsel	2 Kali	53,100,000	DAU
	1	14	01	2.02	06		Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Tapsel	6 Dok	29,058,600	DAU
	1	14	01	2.02	07		Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Tapsel	2 Lap	13,925,200	DAU
	1	14	01	2.05			ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH				
	1	14	01	2.05	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tapsel	67 Stel	105,336,000	DAU
	1	14	01	2.05	011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tapsel	5 Orang	25,000,000	DAU
	1	14	01	2.06			ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH				
	1	14	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tapsel	26 Unit	97,585,000	DAU
	1	14	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tapsel	12 Bulan	43,976,900	DAU
	1	14	01	2.06	05		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tapsel	12 Bulan	251,751,920	DAU
	1	14	01	2.06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tapsel	12 Bulan	8,000,000	DAU
	1	14	01	2.06	09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Kab. Tapsel	510 OH	311,972,000	DAU
	1	14	01	2.08			PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
	1	14	01	2.08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		85 Lbr	2,000,000	DAU
	1	14	01	2.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kab. Tapsel	12 Bln	32,784,136	DAU
	1	14	01	2.08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tapsel	100%	1,346,653,000	DAU
	1	14	01	2.09			PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
	1	14	01	2.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Kab. Tapsel	7 Unit	98,920,000	DAU
	1	14	01	2.09	04		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tapsel	1 Unit	49,516,300	DAU
2	1	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
	1	14	02	2.02			PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN CAKUPAN DAERAH KAB/KOTA				
	1	14	02	2.02	02		Penyediaan Data dan Infromasi Keluarga	Kab. Tapsel	1 Dok	50,686,500	DAU
2	1	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					
	1	14	03	2.01			PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL				
	1	14	03	2.01	06		Penyediaan dan Ditribusi Sarana KIE Program	Kab. Tapsel	25 Org	1,909,800,000	DAU/DAK
	1	14	03	2.01	07		Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	Kab. Tapsel	2 Kali	130,048,000	DAU
	1	14	03	2.01	09		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam, Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab. Tapsel	1 Lap	20,040,000	DAU
	1	14	03	2.02			PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB)				
	1	14	03	2.02	02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kab. Tapsel	25 Org	6,836,157,000	DAU/DAK
	1	14	03	2.03			PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	1	14	03	2.03	05		Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Tapsel	3000 Org	30,000,000	DAU
	1	14	03	2.03	11		Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kab. Tapsel	3000 Org	68,158,000	DAU
2	1	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					
	1	14	04	2.04			PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA				
	1	14	04	2.04	01		Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orangtua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kab. Tapsel	5 Kelompok	33,268,500	DAU
	1	14	04	2.04			PELAKSANAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KAB/KOTA DALAM PEMBANGUNAN KELAURGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA				
	1	14	04	2.04	02		Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Tapsel	5 Kelompok	33,696,000	DAU
							J U M L A H			15,273,839,268	

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

**RENCANA KEGIATAN ANGGARAN (RKA)  
TAHUN 2023**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. TAPANULI SELATAN**

No	Sasaran	Indikator Sasaran		Target Kinerja	Rencana Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	2	3		4	5	6
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	I	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>			
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	100%	3,692,406,212	DAU
		2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Kali	53,100,000	DAU
		3	Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6 Dok	29,058,600	DAU
		4	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan	2 Lap	13,925,200	DAU
		II	<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>			
		1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	67 Stel	105,336,000	DAU
		2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang	25,000,000	DAU
		III	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>			
		1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26 Unit	97,585,000	DAU
		2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12 Bulan	43,976,900	DAU
		3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	251,751,920	DAU
		4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	8,000,000	DAU
		5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	510 OH	311,972,000	DAU
		IV	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>			
		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	85 Lbr	2,000,000	DAU
		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12 Bln	32,784,136	DAU
		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	1,346,653,000	DAU
		V	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>			
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau	7 Unit	98,920,000	DAU
		2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Unit	49,516,300	DAU
2	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>	VI	<b>PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN CAKUPAN DAERAH KAB/KOTA</b>			
		5	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	1 Dok	50,686,500	DAU
3	<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>	VII	<b>PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL</b>			



1	2	3		4	5	6
		6	Penyediaan dan Ditribusi Sarana KIE Program KKBPK	87 Unit	1,909,800,000	DAU/DAK
		7	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	2 Kali	130,048,000	DAU
		9	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam, Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Lap	20,040,000	DAU
		VIII	<b>PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB)</b>			
		1	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	25 Org	6,836,157,000	DAU/DAK
		IX	<b>PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
		1	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1 Dok	30,000,000	DAU
		2	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	3 Lap	68,158,000	DAU
4	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>					
		VIII	<b>PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA</b>			
		1	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orangtua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	5 Kelompok	33,268,500	DAU/DAK
		IX	<b>PELAKSANAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KAB/KOTA DALAM PEMBANGUNAN KELAURGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA</b>			
		1	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 Kelompok	33,696,000	DAU
	<b>J U M L A H</b>				<b>15,273,839,268</b>	

**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)**  
**TAHUN 2022**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. TAPANULI SELATAN**

No	Kode					Program	Lokasi	Target Kinerja	Rencana Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	2					3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>01</b>			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				
	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>01</b>	<b>2.02</b>		<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>				
	1	14	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Kab. Tapsel	12 Bulan	3,692,406,212	DAU
	1	14	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Tapsel	12 Bulan	53,100,000	DAU
	1	14	01	2.02	06	Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kab. Tapsel	6 Dok	29,058,600	DAU
	1	14	01	2.02	07	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Tapsel	2 Lap	13,925,200	DAU
	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>01</b>	<b>2.05</b>		<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT</b>				
	1	14	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Tapsel	240 Stel	105,336,000	DAU
	1	14	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tapsel	5 Orang	25,000,000	DAU
	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>01</b>	<b>2.06</b>		<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>				
	1	14	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Tapsel	46 Unit	97,585,000	DAU
	1	14	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Tapsel	12 Bulan	43,976,900	DAU
	1	14	01	2.06	05	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Tapsel	12 Bulan	251,751,920	DAU
	1	14	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Tapsel	12 Bulan	8,000,000	DAU
	1	14	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Kab. Tapsel	189 OH	311,972,000	DAU
	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>				
	1	14	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Tapsel	200 Pcs	2,000,000	DAU
	1	14	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Kab. Tapsel	12 Bln	32,784,136	DAU
	1	14	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Tapsel	100%	1,346,653,000	DAU
	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>				
	1	14	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Kab. Tapsel	7 Unit	98,920,000	DAU
	1	14	01	2.09	04	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Tapsel	1 Unit	49,516,300	DAU
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>02</b>			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>				
	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>02</b>	<b>2.02</b>		<b>PEMETAAN PERKIRAAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN CAKUPAN DAERAH KAB/KOTA</b>				
	1	14	02	2.02	05	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kab. Tapsel	1 Dok	50,686,500	DAU
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>03</b>			<b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>				
<b>2</b>	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>03</b>	<b>3.03</b>		<b>PELAKSANAAN ADVOKASI, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB SESUAI KEARIFAN BUDAYA LOKAL</b>				
	1	14	03	3.09	06	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Kab. Tapsel	87 Unit	1,909,800,000	DAU/DAK
	1	14	03	3.09	07	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	Kab. Tapsel	2 Kali	130,048,000	DAU
	1	14	03	3.09	09	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam, Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kab. Tapsel	1 Lap	20,040,000	DAU
	<b>1</b>	<b>14</b>	<b>03</b>	<b>3.02</b>		<b>PENDAYAGUNAAN TENAGA PENYULUH KB/PETUGAS LAPANGAN KB (PKB/PLKB)</b>				
	1	14	03	3.02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Kab. Tapsel	25 Org	6,836,157,000	DAU/DAK

1	2					3	4	5	6	7
	1	14	03	3.03		<b>PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN KEBUTUHAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA PELAKSANAAN PELAYANAN KB DI DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				
	1	14	03	3.03	05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kab. Tapsel	1 Dok	30,000,000	DAU
	1	14	03	3.03	07	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kab. Tapsel	3 Lap	68,158,000	DAU
2	1	14	04			<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>				
	1	14	04	4.02		<b>PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA</b>				
	1	14	04	4.02	02	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orangtua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kab. Tapsel	5 Kelompok	33,268,500	DAU
	1	14	04	4.03		<b>PELAKSANAAN DAN PENINGKATAN PERAN SERTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN TINGKAT DAERAH KAB/KOTA DALAM PEMBANGUNAN KELAURGA MELALUI PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA</b>				
	1	14	04	4.03	05	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kab. Tapsel	5 Kelompok	33,696,000	DAU
						<b>J U M L A H</b>			<b>15,273,839,268</b>	

**PERBANDINGAN ANTARA TARGET KINERJA DAN REALISASI KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023  
TAHUN 2023**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. TAPANULI SELATAN**

NO	Indikator Sasaran	Target Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2023	Realisasi Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2023	% Capaian Dari Target	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	100.00	95.32	95.32	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100.00	100.00	100.00	
3	Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	100.00	96.34	96.34	
4	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	100.00	91.66	91.66	
5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	100.00	100.00	100.00	
6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	100.00	100.00	100.00	
7	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	100.00	99.54	99.54	
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100.00	100.00	100.00	
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.00	96.09	96.09	
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100.00	99.00	99.00	
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	100.00	99.61	99.61	
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100.00	100.00	100.00	
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	100.00	65.25	65.25	
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100.00	94.45	94.45	
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	100.00	93.20	93.20	
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.00	99.64	99.64	
17	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	100.00	95.96	95.96	
18	Penyediaan dan Ditribusi Sarana KIE Program KKBPK	100.00	90.70	90.70	
19	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	100.00	99.72	99.72	
20	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam, Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	100.00	88.25	88.25	
21	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	100.00	91.38	91.38	
22	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	100.00	100.00	100.00	
23	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	100.00	90.89	90.89	
24	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orangtua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	100.00	95.58	95.58	
25	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	100.00	94.29	94.29	

**PERBANDINGAN ANTARA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023 DENGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022  
TAHUN 2023**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. TAPANULI SELATAN**

NO	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja Tahun 2022 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	94.53	94.53	95.32	95.32	100.00
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	99.64	99.64	96.34	96.34	100.00
4	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	99.45	99.45	91.66	91.66	100.00
5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	96.00	96.00	100.00	100.00	100.00
7	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	98.11	98.11	99.54	99.54	100.00
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.91	99.91	96.09	96.09	100.00
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	98.40	98.40	99.00	99.00	100.00
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	99.74	99.74	99.61	99.61	100.00
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	88.24	88.24	100.00	100.00	100.00
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	80.26	80.26	65.25	65.25	100.00
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	98.20	98.20	94.45	94.45	100.00
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	89.98	89.98	89.98	89.98	100.00
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99.64	99.64	99.64	99.64	100.00
17	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	95.96	95.96	95.96	95.96	100.00
18	Penyediaan dan Ditribusi Sarana KIE Program KKBPK	90.70	90.70	90.70	90.70	100.00
19	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	99.72	99.72	99.72	99.72	100.00
20	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam, Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	88.25	88.25	88.25	88.25	100.00
21	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	91.70	91.70	91.38	91.38	100.00
22	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
23	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	99.97	99.97	90.89	90.89	100.00
24	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orangtua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	95.58	95.58	95.58	95.58	100.00

1	2	3	4	5	6	7
25	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	94.29	94.29	94.29	94.29	100.00

**PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022 DENGAN TARGET CAPAIAN  
KINERJA AKHIR TAHUN 2023 DALAM DOKUMEN RENCANA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2023**

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. TAPANULI SELATAN**

NO	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja Tahun 2022 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Realisasi Kinerja Tahun 2023 (%)	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Target RKPD (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	94.53	94.53	95.32	95.32	100.00
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3	Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	99.64	99.64	96.34	96.34	100.00
4	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan	99.45	99.45	91.66	91.66	100.00
5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	96.00	96.00	100.00	100.00	100.00
7	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	98.11	98.11	99.54	99.54	100.00
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99.91	99.91	96.09	96.09	100.00
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	98.40	98.40	99.00	99.00	100.00
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	99.74	99.74	99.61	99.61	100.00
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	88.24	88.24	100.00	100.00	100.00
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	80.26	80.26	65.25	65.25	100.00
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	98.20	98.20	94.45	94.45	100.00
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	97.61	97.61	93.20	93.20	100.00
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	89.98	89.98	89.98	89.98	100.00
17	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	99.64	99.64	99.64	99.64	100.00
18	Penyediaan dan Ditribusi Sarana KIE Program KKBPK	90.70	90.70	90.70	90.70	100.00
19	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan	99.72	99.72	99.72	99.72	100.00
20	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam, Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	88.25	88.25	88.25	88.25	100.00
21	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	91.70	91.70	91.38	91.38	100.00
22	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
23	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	99.97	99.97	90.89	90.89	100.00
24	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orangtua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	95.58	95.58	95.58	95.58	100.00

1	2	3	4	5	6	7
25	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	94.29	94.29	94.29	94.29	100.00



REALISASI ANGGARAN  
TAHUN 2023

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KAB. TAPANULI SELATAN

NO	Sasaran Strategis	SKPD yang yang Melaksanakan Program/Kegiatan	Target Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp)	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Dinas Dalduk dan KB	3,692,406,212	3,519,421,189	95.32
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Dalduk dan KB	53,100,000	53,100,000	100.00
3	Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dinas Dalduk dan KB	29,058,600	27,996,500	96.34
4	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Dalduk dan KB	13,925,200	12,764,300	91.66
5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Dalduk dan KB	105,336,000	105,336,000	100.00
6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Dalduk dan KB	25,000,000	25,000,000	100.00
7	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Dinas Dalduk dan KB	97,585,000	97,133,000	99.54
8	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Dalduk dan KB	43,976,900	43,976,000	100.00
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Dalduk dan KB	251,751,920	241,905,400	96.09
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Dalduk dan KB	8,000,000	7,920,000	99.00
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Dinas Dalduk dan KB	311,972,000	310,769,582	99.61
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Dalduk dan KB	2,000,000	2,000,000	100.00
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Dinas Dalduk dan KB	32,784,136	21,390,769	65.25
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Dalduk dan KB	1,346,653,000	1,271,896,271	94.45
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Dinas Dalduk dan KB	98,920,000	89,005,402	89.98
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Dalduk dan KB	49,516,300	49,336,000	99.64
17	Penyediaan Data dan Infromasi Keluarga	Dinas Dalduk dan KB	50,686,500	48,640,000	96
18	Penyediaan dan Ditribusi Sarana KIE Program KKBPK	Dinas Dalduk dan KB	1,909,800,000	1,732,271,960	90.70
19	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK	Dinas Dalduk dan KB	130,048,000	129,688,386	99.72
20	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam, Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Dinas Dalduk dan KB	20,040,000	17,685,000	88.25
21	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Dinas Dalduk dan KB	6,836,157,000	6,247,065,096	91.38
22	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Dinas Dalduk dan KB	30,000,000	30,000,000	100.00
23	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Dinas Dalduk dan KB	68,158,000	61,950,300	90.89
24	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orangtua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Dinas Dalduk dan KB	33,268,500	31,796,500	95.58
25	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dinas Dalduk dan KB	33,696,000	31,772,500	94.29
JUMLAH			15,273,839,268	14,209,820,155	93.03